

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, *good governance*, dan kinerja instansi pemerintah daerah pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya.

3.1.1 Gambaran Umum Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya

Menurut KBBI Daring (2016), dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu atau segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintah. Secara umum, dinas adalah salah satu unsur pelaksana pemerintahan.

Di bawah ini susunan Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Sosial
9. Dinas Tenaga Kerja

10. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
11. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
16. Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Setiap dinas mempunyai tugas pokok membantu wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang yang sesuai dengan dinas tersebut. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, setiap dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai tugas dan fungsinya.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan variabel-variabel pada lokasi yang diteliti

dengan menggunakan angka-angka pada suatu data untuk menarik kesimpulan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sugiyono (2020: 16) bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan analisis data yang bersifat kuantitatif melalui instrumen penelitian untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Beliau juga mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian (Sugiyono, 2020: 147).

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2020: 68), variabel penelitian merupakan karakteristik, sifat, atau nilai yang dimiliki oleh individu, benda, atau aktivitas yang memiliki variasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Sementara itu, operasionalisasi variabel merupakan penjelasan mengenai pengukuran suatu variabel dalam sebuah penelitian (Suhardi, 2023: 24).

Berdasarkan topik penelitian yang diambil oleh penulis, maka variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Variabel Independen

Variabel independen atau biasa disebut sebagai variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen (Sugiyono, 2020: 69). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X_1) dan Pengawasan Internal (X_2).

2. Variabel Intervening

Variabel intervening atau biasa disebut sebagai variabel mediasi merupakan variabel yang berada di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak secara langsung mempengaruhi perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2020: 70). Variabel intervening dalam penelitian ini adalah *Good Governance* (Z).

3. Variabel Dependen

Variabel dependen atau biasa disebut sebagai variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel independen (Sugiyono, 2020: 69). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y).

Berikut merupakan rincian mengenai operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X_1)	Akuntansi sektor publik adalah suatu proses peng-identifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkan. (Majid, 2019: 6)	1. Asumsi dasar 2. Basis akuntansi 3. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan 4. Komponen laporan keuangan 5. Pengakuan komponen laporan keuangan 6. Kualitas laporan keuangan (Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, 2024)	Ordinal
Pengawasan Internal (X_2)	Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit,	1. Perencanaan pengawasan internal	Ordinal

	review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. (Pemerintah Pusat RI, 2008)	2. Pelaksanaan pengawasan internal 3. Pelaporan pengawasan internal 4. Tindak lanjut hasil pengawasan internal 5. Dokumentasi informasi pengawasan internal (Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, 2015)	
<i>Good Governance</i> (Z)	<i>Good governance</i> merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan <i>legal and political framework</i> bagi tumbuhnya aktivitas usaha. (World Bank dalam Mardiasmo, 2018: 23)	1. <i>Participation</i> 2. <i>Rule of law</i> 3. <i>Transparency</i> 4. <i>Responsiveness</i> 5. <i>Consensus orientation</i> 6. <i>Equity</i> 7. <i>Efficiency and effectiveness</i> 8. <i>Accountability</i> 9. <i>Strategic vision</i> (UNDP dalam Mardiasmo, 2018: 23-24)	Ordinal
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y)	Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. (Pemerintah Pusat RI, 2007)	1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) a. Tugas pokok dan fungsi b. Pelayanan publik (IKM) c. Akuntabilitas kinerja (SAKIP) 2. Capaian indikator kinerja sasaran a. Realisasi program b. Realisasi anggaran (Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, 2023)	Ordinal

Sumber: Diolah oleh Penulis

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

3.2.3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka atau data kualitatif yang telah

diberi skor (Sugiyono, 2020: 9). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer. Data primer adalah data yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumbernya. Data primer tersebut didapatkan melalui kuesioner yang disebarkan oleh penulis kepada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya.

3.2.3.2 Populasi Sasaran

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2020: 126). Adapun populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu pegawai di Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan rincian yang disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Populasi Sasaran

No	Nama Dinas	Jumlah Populasi
1.	Dinas Pendidikan	50
2.	Dinas Kesehatan;	891
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	80
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	23
5.	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	56
6.	Dinas Perhubungan	72
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	47
8.	Dinas Sosial	27
9.	Dinas Tenaga Kerja	25
10.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	100
11.	Dinas Lingkungan Hidup	131
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	25
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	33
14.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	37
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29
16.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	23
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	82
Total		1.731

Sumber: Portal Data Kota Tasikmalaya (Diolah oleh Penulis)

3.2.3.3 Penentuan Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan dan mencerminkan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2020: 127). Sampel yang dipilih dari suatu populasi harus bersifat representatif (mewakili) agar dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat mengenai populasi tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *simple random sampling* untuk pengambilan sampel. *Simple random sampling* adalah pengambilan sampel dari suatu populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2020: 129).

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Yamane karena total populasi sudah diketahui sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.2. Secara umum, penentuan jumlah sampel dengan rumus tersebut biasanya menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5% (Sugiyono, 2020: 137).

Berikut perhitungan penentuan jumlah sampel dengan rumus Yamane pada tingkat kesalahan sebesar 5% atau 0,05.

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2} = \frac{1.731}{1 + 1.731 (0,05)^2} = 325$$

Keterangan:

n = Total sampel yang diperlukan

N = Total populasi

e = Tingkat kesalahan sampel

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa total sampel yang diperlukan sebanyak 325 sampel. Setelah total sampel yang diperlukan sudah

diketahui, selanjutnya dilakukan perhitungan jumlah sampel pada masing-masing dinas dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Keterangan:

n_i = Jumlah sampel yang diperlukan pada masing-masing dinas

N_i = Jumlah populasi masing-masing dinas

N = Total populasi

n = Jumlah sampel yang diperlukan

Hasil dari perhitungan jumlah sampel pada masing-masing dinas dengan menggunakan rumus di atas dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Jumlah Sampel

No	Nama Dinas	Jumlah Sampel
1.	Dinas Pendidikan	9
2.	Dinas Kesehatan;	167
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	15
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4
5.	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	11
6.	Dinas Perhubungan	14
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9
8.	Dinas Sosial	5
9.	Dinas Tenaga Kerja	5
10.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	19
11.	Dinas Lingkungan Hidup	25
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	5
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	6
14.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	7
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5
16.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	4
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	15
Total		325

Sumber: Diolah oleh Penulis

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini ditetapkan untuk memastikan bahwa responden yang terlibat memiliki relevansi dengan fenomena yang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pegawai yang memiliki tanggung jawab atas penyusunan anggaran dan laporan keuangan instansi.
2. Pegawai yang memahami penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, *good governance*, dan kinerja instansi pemerintah daerah.

3.2.3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang memuat pernyataan mengenai variabel yang diteliti. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2020: 199).

Setiap pernyataan dalam kuesioner tersebut dilengkapi dengan alternatif tanggapan yang diberi skor untuk memudahkan penilaian. Untuk menilai pendapat responden mengenai variabel-variabel yang diteliti, penulis menggunakan Skala Likert. Skala Likert berfungsi untuk menilai sikap, pandangan, dan persepsi suatu individu atau kelompok mengenai fenomena sosial (Sugiyono, 2020: 146).

Skor yang digunakan penulis dalam menilai tanggapan dari responden mengenai pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam kuesioner dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Skala Likert

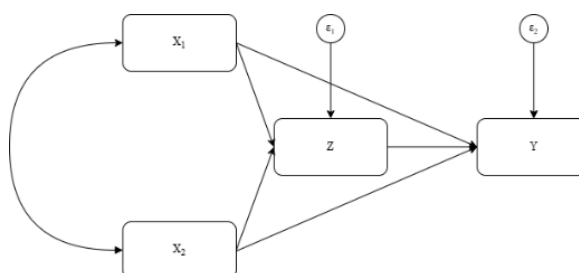
Alternatif Tanggapan	Skor Jawaban Positif	Skor Jawaban Negatif
Sangat Setuju	5	1
Setuju	4	2
Netral	3	3
Tidak Setuju	2	4
Sangat Tidak Setuju	1	5

Sumber: Sugiyono (2020: 147)

3.2.4 Model Penelitian

Model penelitian adalah pola yang menggambarkan hubungan antara variabel yang akan diteliti juga menunjukkan jenis dan jumlah rumusan masalah, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, serta teknik analisis statistik yang diterapkan (Sugiyono, 2020: 72). Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model hubungan variabel jalur yang terdiri dari 2 variabel independen, 1 variabel intervening, dan 1 variabel dependen.

Berikut merupakan gambar mengenai model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 3.1

Model Penelitian

Keterangan:

X_1 = Penerapan Akuntansi Sektor Publik

X_2 = Pengawasan Internal

Z = *Good Governance*

Y = Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

$\varepsilon_1, \varepsilon_2$ = Faktor lain di luar variabel yang diteliti

3.2.5 Teknik Analisis Data

3.2.5.1 Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Menurut (Ghozali, 2018: 66), uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Sebuah kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Rumus yang digunakan dalam uji validitas dapat menggunakan rumus *Product Moment* sebagai berikut.

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah responden

x = Skor masing-masing variabel x

y = Skor masing-masing variabel y

Uji validitas dalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan IBM SPSS Versi 27 dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut.

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item dapat dinyatakan valid.
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item dapat dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2018: 61), uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dikatakan reliabel apabila ditemukan konsistensi jawaban seseorang terhadap suatu pernyataan atau stabil dalam waktu ke waktu.

Teknik yang digunakan dalam uji reliabilitas dapat menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* sebagai berikut.

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan:

α (alpha) = Koefisien reliabilitas

k = Banyaknya butir pertanyaan dan butir soal

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah variasi butir

σ_t^2 = Variasi total

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan IBM SPSS Versi 27 dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut.

- a. Jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,70$, maka item dapat dinyatakan reliabel.
- b. Jika nilai *Cronbach's Alpha* $< 0,70$, maka item dapat dinyatakan tidak reliabel.

3.2.5.2 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2020: 206), analisis deskriptif merupakan penganalisisan data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat suatu kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Analisis deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengukuran hasil kuesioner dengan persentase dan skoring untuk menyederhanakan interpretasi setiap tanggapan responden.

Adapun rumus yang digunakan dalam mengukur hasil kuesioner dengan persentase dan skoring adalah sebagai berikut.

$$X = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Jumlah persentase jawaban

F = Jumlah jawaban

N = Jumlah responden

Setelah diketahui nilai dari keseluruhan indikator setiap variabel, selanjutnya menentukan Nilai Jenjang Interval (NJI) dengan rumus sebagai berikut.

$$NJl = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Jumlah kriteria pernyataan}}$$

3.2.5.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji normal atau tidaknya distribusi residual dalam suatu model regresi (Ghozali, 2018: 196). Uji t

dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk mendeteksi residual terdistribusi normal atau tidaknya dapat dilihat melalui nilai rasio *skewness* dan kurtosis dari residual.

Nilai rasio *skewness* dan kurtosis dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Rasio Skewness} = \frac{\text{Statistic Skewness}}{\text{SE Skewness}} \text{ dan Rasio Kurtosis} = \frac{\text{Statistic Kurtosis}}{\text{SE Kurtosis}}$$

Uji normalitas dalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan IBM SPSS Versi 27 dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut.

- a. Jika nilai *skewness* dan kurtosis berada di antara -2 sampai 2, maka distribusi residual dapat dinyatakan normal.
- b. Jika nilai *skewness* dan kurtosis berada di luar -2 sampai 2, maka distribusi residual dapat dinyatakan tidak normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam suatu model regresi (Ghozali, 2018: 157). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel bebas yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel bebas dengan nilai sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya

multikolinearitas dapat dilihat melalui perhitungan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan IBM SPSS Versi 27 dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut.

- a. Jika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau nilai VIF ≥ 10 , maka menunjukkan adanya multikolinearitas.
- b. Jika nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau nilai VIF ≤ 10 , maka menunjukkan tidak adanya multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadi atau tidaknya ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam suatu model regresi (Ghozali, 2018: 178). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik *plot* antara nilai prediksi variabel terikat, yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Pendeteksian keberadaan heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED.

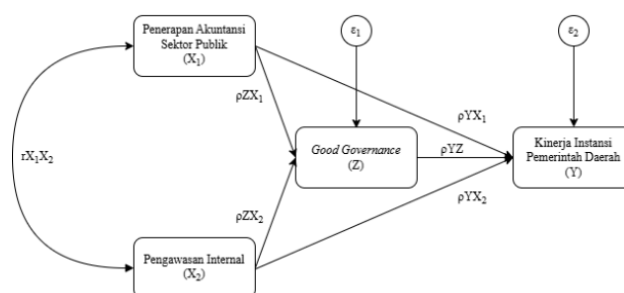
Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan IBM SPSS Versi 27 dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut.

- Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu secara teratur, maka terjadi heteroskedastisitas.
- Jika ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.2.5.4 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

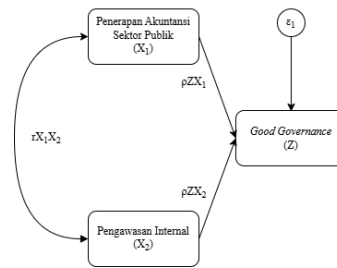
Menurut Sugiyono (2020: 77) analisis jalur merupakan analisis yang dilakukan dengan menggunakan korelasi dan regresi, sehingga dapat diketahui sampai dengan variabel dependen terakhir serta wajib melalui jalur langsung atau variabel intervening. Dalam penelitian ini, analisis jalur digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel intervening serta pengaruh variabel independen dan intervening terhadap variabel dependen.

Diagram jalur antar variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2, 3.3, dan 3.4.



Gambar 3.2

Analisis Jalur Struktural

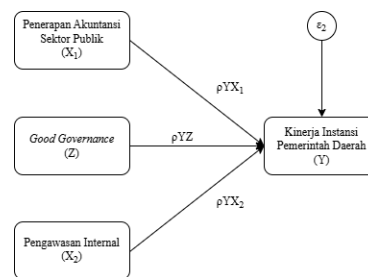


Gambar 3.3

Analisis Jalur Sub Struktural 1

Untuk analisis jalur sub struktural 1, menggunakan persamaan sebagai berikut.

$$Z = \rho_{ZX_1}X_1 + \rho_{ZX_2}X_2 + \varepsilon_1$$



Gambar 3.4

Analisis Jalur Sub Struktural 2

Untuk analisis jalur sub struktural 2, menggunakan persamaan sebagai berikut.

$$Y = \rho_{YX_1}X_1 + \rho_{YX_2}X_2 + \rho_{YZ}Z + \varepsilon_2$$

Keterangan:

X_1 = Penerapan Akuntansi Sektor Publik

X_2 = Pengawasan Internal

Z = *Good Governance*

Y = Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

$\varepsilon_1, \varepsilon_2$ = Koefisien Residual

$r_{X_1X_2}$ = Koefisien korelasi X_1 dengan X_2

ρ_{ZX_1} = Koefisien jalur Z dengan X_1

ρ_{ZX_2} = Koefisien jalur Z dengan X_2

ρ_{YX_1} = Koefisien jalur Y dengan X_1

ρ_{YX_2} = Koefisien jalur Y dengan X_2

ρ_{YZ} = Koefisien jalur Y dengan Z

Menurut Dillon dan Goldstein dalam Syaban dan Ratnaningrum (2021), terdapat langkah kerja perhitungan yang perlu dilakukan dalam analisis jalur sebagai berikut.

1. Menghitung Matriks Korelasi

Dalam penelitian ini, menghitung matriks korelasi antar variabel dengan rumus sebagai berikut.

$$r_{xy} = \frac{(\sum_{i=1}^n X_i Y_i) - (\sum_{i=1}^n X_i) (\sum_{i=1}^n Y_i)}{\sqrt{\{(n \sum_{i=1}^n X_i^2) - (\sum_{i=1}^n X_i)^2\} \{(n \sum_{i=1}^n Y_i^2) - (\sum_{i=1}^n Y_i)^2\}}}$$

Selanjutnya, hasil dari perhitungan dengan rumus tersebut disajikan ke dalam bentuk matriks sebagai berikut.

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1k} \\ r_{21} & 1 & \cdots & r_{2k} \\ \cdots & \cdots & 1 & \cdots \\ r_{k1} & r_{k2} & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

Kemudian, menghitung matriks korelasi antar variabel eksogen dengan bentuk matriks sebagai berikut.

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1k} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ C_{k1} & C_{k2} & \cdots & C_{kk} \end{bmatrix}$$

2. Menghitung Koefisien Jalur

Dalam penelitian ini, menghitung semua koefisien jalur ρ_{YX_i} ($i = 1, 2, 3, \dots k$) dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\begin{bmatrix} \rho_{YX_1} \\ \rho_{YX_2} \\ \rho_{YX_k} \\ \rho_{YX_k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{1k} \\ C_{21} & C_{22} & \dots & C_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_{k1} & C_{k2} & \dots & C_{kk} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{YX_1} \\ r_{YX_2} \\ r_{YX_k} \\ r_{YX_k} \end{bmatrix}$$

3. Menghitung Koefisien Determinasi

Dalam penelitian ini, menghitung koefisien determinasi menggunakan rumus sebagai berikut.

$$R^2 = (\rho_{YX_1}, \rho_{YX_2}, \rho_{YX_k}) \begin{pmatrix} r_{YX_1} \\ r_{YX_2} \\ r_{YX_k} \end{pmatrix}$$

4. Menghitung Koefisien Residual

Dalam penelitian ini, menghitung koefisien residual menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\varepsilon_{1,2} = \sqrt{1 - R_{1,2}^2}$$

5. Menghitung Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Untuk menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X_1) Terhadap <i>Good Governance</i> (Z)		
Pengaruh Langsung	$(\rho_{ZX_1})^2$	A
Pengaruh Tidak Langsung Melalui X_2	$(\rho_{ZX_1})(r_{X_1X_2})(\rho_{ZX_2})$	B
Total Pengaruh X_1 Terhadap Z	A + B	C
Pengaruh Pengawasan Internal (X_2) Terhadap <i>Good Governance</i> (Z)		
Pengaruh Langsung	$(\rho_{ZX_2})^2$	D
Pengaruh Tidak Langsung Melalui X_1	$(\rho_{ZX_2})(r_{X_1X_2})(\rho_{ZX_1})$	E

Total Pengaruh X_2 Terhadap Z	D + E	F
Total Pengaruh X_1 dan X_2 Terhadap Z	C + F	G
Residual Sub Struktural 1	1 – G	H
Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X_1) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah daerah (Y)		
Pengaruh Langsung	$(\rho YX_1)^2$	I
Pengaruh Tidak Langsung Melalui X_2	$(\rho YX_1)(rX_1X_2)(\rho YX_2)$	J
Pengaruh Tidak Langsung Melalui Z	$(\rho YX_1)(rX_1Z)(\rho YZ)$	K
Total Pengaruh X_1 Terhadap Y	I + J + K	L
Pengaruh Pengawasan Internal (X_2) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah daerah (Y)		
Pengaruh Langsung	$(\rho YX_2)^2$	M
Pengaruh Tidak Langsung Melalui X_1	$(\rho YX_2)(rX_1X_2)(\rho YX_1)$	N
Pengaruh Tidak Langsung Melalui Z	$(\rho YX_2)(rX_2Z)(\rho YZ)$	O
Total Pengaruh X_2 Terhadap Y	M + N + O	P
Pengaruh <i>Good Governance</i> (Z) Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y)		
Pengaruh Langsung	$(\rho YZ)^2$	Q
Pengaruh Tidak Langsung Melalui X_1	$(\rho YZ)(rX_1Z)(\rho YX_1)$	R
Pengaruh Tidak Langsung Melalui X_2	$(\rho YZ)(rX_2Z)(\rho YX_2)$	S
Total Pengaruh Z Terhadap Y	Q + R + S	T
Total Pengaruh X_1, X_2, dan Z Terhadap Y	L + P + T	U
Residual Sub Struktural 2	1 – U	V

3.2.5.5 Uji Hipotesis

1. Penetapan Hipotesis Operasional

a. Secara Parsial

$$H_{0_1} : \rho ZX_1 = 0$$

Penerapan akuntansi sektor publik secara parsial tidak berpengaruh terhadap *good governance*.

$$H_{a_1} : \rho ZX_1 > 0$$

Penerapan akuntansi sektor publik secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *good governance*.

$$H_{0_2} : \rho ZX_2 = 0$$

Pengawasan internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap *good governance*.

$$H_{a_2} : \rho_{ZX_2} > 0$$

Pengawasan internal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *good governance*.

$$H_{0_3} : \rho_{YX_1} = 0$$

Penerapan akuntansi sektor publik secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

$$H_{a_3} : \rho_{YX_1} > 0$$

Penerapan akuntansi sektor publik secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

$$H_{0_4} : \rho_{YX_2} = 0$$

Pengawasan internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

$$H_{a_4} : \rho_{YX_2} > 0$$

Pengawasan internal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

$$H_{0_5} : \rho_{YZ} = 0$$

Good governance secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

$$H_{a_5} : \rho_{YZ} > 0$$

Good governance secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

b. Secara Simultan

$$H_{0_6} : \rho_{ZX_1}, \rho_{ZX_2} = 0$$

Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal secara simultan tidak berpengaruh terhadap *good governance*.

$$H_{a_6} : \rho_{ZX_1}, \rho_{ZX_2} \neq 0$$

Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *good governance*.

$$H_{0_7} : \rho_{YX_1}, \rho_{YX_2}, \rho_{YZ} = 0$$

Penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan *good governance* secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

$$H_{a_7} : \rho_{YX_1}, \rho_{YX_2}, \rho_{YZ} \neq 0$$

Penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan *good governance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

2. Penetapan Tingkat Keyakinan

Dalam penelitian ini, digunakan tingkat keyakinan atau *Confidence Interval* (CI) sebesar 95% dengan titik kritis atau alpha (α) sebesar 5%. Titik kritis sebesar 5% merupakan taraf signifikansi yang secara umum digunakan dalam penelitian sosial karena dianggap cukup ketat untuk mewakili pengaruh antar variabel yang diteliti.

3. Uji Signifikansi

a. Secara Parsial

Untuk menguji signifikansi pengaruh secara parsial dapat menggunakan uji t. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018: 148). Uji t dalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan IBM SPSS Versi 27, adapun rumus yang dapat digunakan untuk pengujian secara manual adalah sebagai berikut.

$$t = \frac{\rho_{YX}}{\sqrt{\frac{(1 - R_{Y(X_1, X_2, \dots, X_k)}^2) C_{ii}}{n - k - 1}}}$$

b. Secara Simultan

Untuk menguji signifikansi pengaruh secara simultan dapat menggunakan uji F. Uji F digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen secara simultan dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018: 148). Uji F dalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan IBM SPSS Versi 27, adapun rumus yang dapat digunakan untuk pengujian secara manual adalah sebagai berikut.

$$F = \frac{(n - k - 1) R_{Y(X_1, X_2, \dots, X_k)}^2}{k (1 - R_{Y(X_1, X_2, \dots, X_k)}^2)}$$

4. Kaidah Keputusan

a. Secara Parsial

- 1) H_0 diterima dan H_a ditolak jika $\text{Sig.} > 0,05$.
- 2) H_0 ditolak dan H_a diterima jika $\text{Sig.} < 0,05$.

b. Secara Simultan

- 1) H_0 diterima dan H_a ditolak jika $\text{Sig.} > 0,05$.
- 2) H_0 ditolak dan H_a diterima jika $\text{Sig.} < 0,05$.

5. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari berbagai pengujian yang dilakukan penulis dengan analisis secara kuantitatif, maka hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan untuk mengetahui dan menyatakan ditolak atau diterimanya hipotesis yang telah ditetapkan.